

Wako Setuju Perda Pajak Ditunda

- ▶ Respon Keberatan dari Asosiasi
- ▶ Minta Pengusaha Buat Surat



Kalau tidak dilakukan usaha dan upaya untuk perbaikan dunia usaha dan ekonomi, tidak akan ada perubahan

JADI RAJAGUKGUK
Ketua Kadin Batam

BATAM, TRIBUN - Maret ini, Pemerintah Kota Batam bakal menerapkan pemberlakuan pajak daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017. Di situ ada beberapa pajak daerah yang mengalami kenaikan persentase. Di antaranya pajak hiburan.

Meskipun penerapan pajak sebagaimana perda baru itu sudah ditunda sejak Desember lalu, di sisi lain rencana penerapannya Maret ini juga masih dikeluhkan kalangan pengusaha. Dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam misalnya.

Menurut Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk, dengan kondisi ekonomi Batam yang masih lesu saat ini, belum tepat jika kenaikan sejumlah pajak tersebut diterapkan. Ia memberi perumpamaan dengan orang sakit dan belum pulih dari sakitnya, namun diminta untuk mengangkat beban seberat 100 kg.

"Kondisi ekonomi Batam belum pulih. Tiba-tiba dibebani pajak. Kita paham Batam saat ini defisit karena APBD dan PAD tak berimbang. Di sisi lain, kita bisa lihat kondisi sebenarnya yang terjadi. Saya kira Pemko juga bisa melihat kondisi yang terjadi saat ini," kata Jadi kepada *Tribun*, Senin (26/2).

Di sisi lain, Jadi mengatakan dari Kadin juga belum pernah diajak berdiskusi terkait rencana penerapan kenaikan pajak daerah ini. Berapa persen kenaikannya, sektor apa saja dan lainnya.

"Hal-hal seperti ini maunya didiskusikan dululah. Saya tidak tahu dengan asosiasi apa sudah pernah diajak diskusi, tapi dari Kadin belum pernah. Kita ingin meningkatkan PAD, tapi lihat kondisi ekonomi jugalah," ujarnya.

Tempat Hiburan Banyak Tutup

SEMAKIN lesunya industri di Kota Batam belakangan ini, diikuti dengan banyaknya tempat hiburan malam yang tutup. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Batam, Am-sakar Achmad mengungkapkan Batam harus kembali mengandalkan sektor pariwisata.

"Saya belum dapat informasi soal itu (banyak tempat hiburan yang tutup). Jika soal tempat hiburan tanyakan sama orang pariwisata, perihal Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita mengandalkan sektor pariwisata. Sektor pari-

Wako Setuju

Di tengah kondisi saat ini, Jadi juga meminta pemerintah dan DPRD Kota Batam fokus pada pengembangan usaha. Beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti melakukan perbaikan dan peningkatan sistem pelayanan perizinan. Selain itu memberikan insentif dan kemudahan dalam berusaha.

Termasuk juga mencari solusi-solusi terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha. Tidak lain tujuannya agar kondisi ekonomi Batam bisa pulih.

"Kalau tidak dilakukan usaha dan upaya untuk perbaikan dunia usaha dan ekonomi, tidak akan ada perubahan," kata Jadi.

Meski di lapangan sudah ada keberatan terkait rencana kenaikan pajak daerah ini, anggota DPRD Kota Batam, baik Uba Ingan Sigalingging maupun Sukaryo mengatakan, DPRD belum menerima surat keberatan secara resminya.

"Setahu saya belum ada surat keberatan. Tapi siapa tahu secara lembaga sudah masuk ke pimpinan," kata Sukaryo.

Sebelumnya, Sukaryo tak memungkiri, di tengah kondisi ekonomi Batam saat ini memang bukan hal tepat untuk menaikkan pajak daerah. Perda pajak daerah itu sendiri, kata dia, sudah dibahas sejak 2015 lalu. Saat itu be-

saran kenaikan yang diajukan memang menggunakan asumsi optimis.

"Sekarang persoalannya apakah bisa, berlakunya perda ini dibuat mundur atau dikaji ulang. Kami dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah akan memberikan gambaran kepada pimpinan. Pimpinan yang selanjutnya berkomunikasi dengan Pemko sebagai eksekutif," ujar dia.

Terpisah, Wali Kota Batam, Rudi mengatakan, prinsipnya Pemerintah Kota Batam bersedia menunda penerapan pajak daerah sebagaimana Perda Nomor 7 Tahun 2017 itu. Sepanjang ada persetujuan dari DPRD

Sambungan Hal.13

Kota Batam.

"Perda inikan sudah ada. Kalau pengusaha keberatan, segera kirim surat keberatannya, sebelum kita berlakukan perdanya. Saya kan tak boleh memutuskan sendiri juga, perda ini tak boleh ditunda. Kalau mau ditunda, harus seizin dari DPRD," kata Rudi.

Jika ada surat keberatan resmi dari asosiasi pengusaha, selanjutnya Pemko akan ber kirim surat kepada DPRD Kota Batam, mendiskusikan perihal penerapan pajak daerah ini.

"Kita ajak DPRD bicara. Kalau setuju ditunda, kita tunda. Kalau tidak, ya jalan," ujarnya. **(wie)**

Jokowi Setuju Jembatan Batam-Bintan

PROYEK STRATEGIS KEPRI

- Jembatan Batam-Bintan: Rp 7,1 triliun
- KEK Tanjung Sauh: Rp 20 triliun
- KCK Galang Batang: Rp 36,2 triliun
- KEK Pulau Asam
- Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar
- Modernisasi Bandara Hang Nadim
- Pembangunan Batam Light Rapit Transit

▶ Investasi Rp 7,1 Triliun

▶ Hasil Ratas dengan Gubernur Kepri

BATAM, TRIBUN - Mimpi untuk menghubungkan Pulau Batam dengan Pulau Bintan bakal terwujud. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui beberapa usulan pembangunan Kepri, termasuk Jembatan Batam-Bintan.

Kepastian pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil rapat terbatas (ratas) antara Jokowi dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/2).

Selain Jembatan Batam-Bintan, Jokowi juga menyetujui beberapa proyek strategis lain di Kepri.

"Rencana investasi yang kami sampaikan. Alhamdulillah semua disetujui Presiden. Para Menteri diminta mem-follow up dan mencari aturan supaya investasi yang masuk, dipermudah," kata Nurdin.

Ada tujuh proyek strategis yang dibahas dalam pertemuan itu. Yakni, Jembatan Batam-Bintan, Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK) Tanjung Sauh, KEK Galang Batang, KEK Pulau Asam, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, pengembangan dan modernisasi Bandara Hang Nadim serta pembangunan Batam LRT (Light Rapit Transit).

Konsep Jembatan Batam-Bintan sebenarnya sudah mencuat sejak Ismeth Abdullah menjabat sebagai Ketua Oto-

Jokowi Setuju

rita (sekarang Badan Pengu-sahaan/BP) Batam. Namun hingga kini belum ada perkembangan tahapan pembanguan.

Jembatan Batam-Bintan, rencana sepanjang tujuh kilometer. Menurut Nurdin, pembangunan jembatan itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi, mobilitas orang, kendaraan, barang dan jasa industri serta pasokan air bersih dan gas dari Batam ke Bintan atau sebaliknya.

Total investasi yang siap dikucurkan investor sebesar Rp 7,1 triliun.

Kepri meminta dukungan aturan pemerintah untuk merealisasikan proyek ini melalui skema *joint venture* bersama investor swasta dan *local partner*. Sementara, untuk Pelabuhan Tanjung Sauh, bakal masuk nilai investasi sebesar Rp 20 triliun.

Kawasan ini nantinya menjadi pelabuhan peti kemas modern, *container yard* dan kawasan industri terpadu pengolahan dan penyimpanan gas serta sebagai *logistic hub* dan *port gate way* di wilayah Indonesia bagian barat dan dapat memangkas *dwelling time*. Target kapasitas sebanyak 5 juta TEUs per tahun.

Lalu, KEK Galang Batang, sudah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (P) Nomor 42 tahun 2017. Hingga akhir 2017, nilai investasi yang sudah direalisasikan mencapai Rp 1,1 triliun dari total rencana Rp 36,2 triliun.

Dalam pertemuan itu, Nurdin menyampaikan agar segera ditetapkannya Keppres tentang Dewan Kawasan.

Karena berkasnya sudah ada, saat pertemuan itu, Jokowi langsung menandatangani Keppresnya.

"Soal KEK Galang Batang, tadi Bapak Presiden di depan saya langsung menandatangani Keppres untuk Dewan Kawasan," kata dia.

Nurdin yakin realisasi investasi di Galang Batang semakin cepat. Investor akan langsung melakukan pembangunan jalan dan pelabuhan, termasuk energi untuk mendukung industri tersebut.

Untuk KEK Pulau Asam, akan dijadikan pusat pengumpul migas, industri dan *container yard* untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Nurdin menyampaikan untuk kawasan ini, Jokowi langsung memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menuntaskan persoalan terkait.

Untuk pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, rencananya dilakukan beberapa pengembangan dengan tujuan untuk memodernisasi sarana dan prasarana, pengembangan *container yard*, pengembangan *port management system*.

Kapasitasnya yang dalam setahun hanya 400 ribu TEUs akan ditingkatkan menjadi satu juta TEUs.

Sementara untuk Batam LRT dikembangkan untuk penyediaan transportasi massal, murah dan mampu mengatasi kemacetan.

Rute yang direncanakan mulai dari Bandara Hang Nadim-Nagoya dan Tanjungpinang-Mukakuning-Batam Center. Bandara juga akan terus dilengkapi fasilitasnya.

Strategisnya Kepri pada pertemuan itu dipaparkan Nurdin secara singkat. Jika dikelola secara baik, pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ahamdulillah semua di-respons dan diminta dilak-

sanakan segera. Saya bilang ini hadiah untuk masyarakat Kepri," kata Nurdin.

Pada pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dari Kepri, Nurdin didampingi Sekdaprov TS Arif Fadillah, Asisten Ekbang Syamsul Bahrum, Karo Pembangunan Aries Fhariandi, Kadis Pekerjaan Umum Abu Bakar, Kadis Perhubungan Jamhur Ismail dan Kadisperindag Burhanuddin.

Juga ada, Karo Humas Protokol dan Penghubung Nilwan, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan dan Investasi Jhon Kennedy dan Direktur PT Bintan Alumina Indonesia Santoni.

"Setelah semua proyek disetujui, akan meningkatkan ekonomi Kepri dan nasional," kata Nurdin.

Terintegrasi

Arah pengembangan Batam ke depan akan terintegrasi dengan Bintan dan Karimun. Upaya ke arah itu dengan infrastruktur, yakni membangun jembatan Batam-Bintan.

Saat ini pemprov getol mempromosikan pembangunan jembatan tersebut, baik kepada pemerintah pusat maupun calon investor.

Sementara Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, jika Batam ingin berkembang, kendala yang akan dihadapi di masa depan adalah hal-hal yang berkaitan dengan daya dukung.

Karena itu, BP Batam sepakat mengintegrasikan Batam, Bintan dan Karimun.

"Batam dengan Bintan, secara fisik kita sedang dorong betul untuk pembangunan Jembatan Dalam Bintan.

Jembatan ini untuk mempercepat mobilitas dan daya dukung," kata Lukita.

Diakutinya, saat ini Bintan belum berkembang pesat seperti Batam. Namun di sisi lain, biaya hidup di sana jauh lebih murah dibanding Batam. Pemikiran ke depan, dengan jembatan itu orang Bintan bisa bekerja di Batam dan tetap bertempat tinggal di Bintan.

Dengan cara itu bisa tercapai pemerataan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Memang saat ini sudah bisa terhubung lewat ferry dari Batam ke Bintan. Tapi kalau ada jembatan kan beda," ujarnya.

Lukita menilai, keberadaan Jembatan Batam-Bintan menjadi satu kesatuan masa depan yang penting bagi Batam secara berkelanjutan. Desain jembatan itu sendiri, dirancang tidak hanya untuk orang dan barang.

"Tapi bagaimana bisa dilakukan pergerakan secara masif di sana. Misalnya dengan LRT atau MRT (mass rapid transit)," kata Lukita.

Sementara untuk integrasi Batam-Bintan dan Karimun diakui dia, lebih pada keinginan untuk menghubungkan koneksi digital.

"Kita ingin Batam ja frontirnya. Dengan komitmen bersama, inilah saatnya. Yang belum memperluas hanya, silakan datang ke tam. Kami yakin dengan bersamaan antara Pem BP dan Pemko Batam bisa memberikan dorongan baru bagi investor agar datang ke Batam," tegas

(tom/wie)

Disdik Dapat Suntikan Dana

- ▶ Lanjutkan Pembangunan Sekolah
- ▶ Anggaran Didapat dari DAK

BINTAN, TRIBUN - Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan pada 2018 akan melakukan renovasi dan perbaikan sekolah. Disdik akan mendapatkan tambahan rehabilitasi sebesar Rp 1,1 Miliar.

Dana tambahan perbaikan ini didapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Bintan. Sebelumnya Disdik telah membangun sarana seperti paving blok, pembangunan batu miring dan lain-lain.

Namun tidak disebutkan sekolah apa saja yang sudah direhab melalui dana tersebut. Kemudian ada Rp 6 miliar terkucur dari pemerintah pusat.

Namun dengan dana tersebut, apakah kondisi sekolah sudah memadai semua? Ternyata belum. Kadisdik Bintan Tamsir mengatakan

masih ada lagi kekurangan yang perlu dibenahi.

"Untuk sekolah SD, kita masih defisit ruang belajar. Data kita, masih hampir 80 ruangan kelas lagi diperlukan. Ini yang sedang kita upayakan bagaimana agar defisit ruang belajar ini bisa ditutupi," kata Tamsir, Selasa (27/2).

Pada Senin (26/2) kemarin, Pemkab meresmikan gedung SMP Negeri 2 Bintan hasil renovasi. Biaya yang dihabiskan merenovasi gedung Rp 1,7 miliar dan Unit Sekolah Baru (USB) TK Muhammadiyah 2 Bintan dengan anggaran lebih kurang Rp 300 juta. Peresmian disejalankan dengan penyerahan hasil pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan rehabilitasi gedung SD dan SMP periode anggaran 2017 lalu. (min)

Pesona Mu

RUMAH

Jalan Raya Lintas Barat Simpang



HOT PR

GRATIS SEMUA BIAYA AK

Cukup Bayar **800**

Langsung Pemb

INFO MARKETING :

0852 2850 7789 (RE

HUBUNGI KAMI di Nland Prope

KM.IX Ruko No.1 (Seberang Ap